

Bandung dan Evolusi Tata Ekonomi Internasional Baru

Djisman S. SIMANDJUNTAK

Sebagaimana Dasasila Bandung dapat dipandang sebagai permulaan kurun baru dalam perjuangan kemerdekaan dari banyak bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, Komunike Final Bandung pun dapat disebut sebagai embrio Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB). Kerjasama ekonomi sesama peserta Konperensi Asia-Afrika berupa bantuan teknis dan usaha bersama, stabilisasi perdagangan komoditi berikut aksi bersama untuk penstabilan harga dan permintaan komoditi primer, diversifikasi perdagangan ekspor melalui pengolahan, promosi perdagangan intraregional, jaminan transit bagi negara-negara daratan (landlocked), masalah-masalah pelayaran umumnya dan ongkos pelayaran khususnya dan pendirian bank regional dan perusahaan asuransi sudah masuk ke dalam Komunike Final Bandung. Tentu saja dalam komunike ini belum ditemukan usul-usul konkrit. Namun demikian, persoalan-persoalan ini mewakili bagian terbesar dari apa yang belakangan dikenal sebagai unsur-unsur TEIB. Meskipun gagasan-gagasan tersebut mengalami perluasan, dan untuk sebagian radikalisisasi, sejak KTT Non-Blok Pertama di Beograd tahun 1961 dan Konperensi tentang Masalah-masalah Pembangunan Ekonomi di Kairo tahun 1962, kiranya Komunike Final Bandung tetap perlu dicatat sebagai bagian penting dari upaya negara-negara berkembang umumnya dan Asia-Afrika khususnya dalam emansipasi ekonomik.

ASAS POKOK DAN UNSUR UTAMA TEIB

Adalah menarik untuk dicatat bahwa Komunike Final Bandung lahir hanya beberapa tahun sesudah pendirian Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan

penandatanganan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Sedini tahun 1955 negara-negara Asia-Afrika sudah menganggap bahwa ketiga perangkat tersebut di atas adalah tidak lengkap untuk dapat menjadi Tata Ekonomi Internasional bagi semua bangsa-bangsa. Sebagaimana akan ditunjukkan dalam bagian berikut asas-asas yang melandasi TEIB yang dirancang oleh negara-negara berkembang adalah sangat berbeda dari asas-asas yang melandasi IMF, IBRD, dan GATT, kalau tidak bertolak belakang.

Dengan Piagam Atlantik yang mengukuhkan kedudukan Amerika Serikat sebagai kekuasaan global menggantikan Inggris sebagai latar belakang, tata ekonomi internasional yang dijabarkan dalam anggaran dasar IMF dan IBRD serta aturan-aturan GATT pada dasarnya berasas liberalisasi hubungan ekonomi antar bangsa, non-diskriminasi atau perlakuan sama bagi setiap bangsa, dan ketimbalbalikan (resiprositas) yang berarti bahwa suatu konsesi harus diimbai dengan konsesi. Sebaliknya dengan sejarah kolonialisme sebagai latar belakang, asas-asas utama TEIB yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang adalah dirigisme yang berarti bahwa hubungan ekonomi antar bangsa dicampuri secara kuat oleh negara, diskriminasi yang berarti perlakuan istimewa bagi negara-negara sedang berkembang dan unilateralisme yang berarti bahwa konsesi yang diberi kepada negara berkembang tidak perlu diimbai. Dengan asumsi bahwa keterbelakangan ekonomik negara-negara sedang berkembang adalah akibat dari kolonialisme dan imperialisme, dalam TEIB diajukan banyak tuntutan yang dipandang lebih banyak sebagai reparasi daripada sebagai transaksi. Posisi ini tampak dengan jelas dalam semua unsur-unsur TEIB.

Perdagangan komoditi primer sudah sejak lama, bahkan sebelum Konferensi Asia-Afrika, menjadi keprihatinan utama dari produsen-produsen komoditi yang bersangkutan. Apa yang dikenal sebagai Perjanjian Komoditi adalah bukan penemuan negara berkembang. Pemerintah kolonial pun sudah berusaha untuk sesedikitnya memperkecil fluktuasi harga internasional dari komoditi-komoditi primer. Yang dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah perancangan skema stabilisasi yang sekomprensif dan seketat mungkin.

Di antara instrumen-instrumen terpenting yang diandalkan negara-negara berkembang termasuk terowongan harga atau batas atas dan batas bawah harga, cadangan penyangga, pembelanjaan bersama dari cadangan penyangga, kuota produksi dan atau penjualan, kewajiban pembelian di pihak konsumen untuk mencegah fluktuasi besar dalam permintaan, stabilisasi penerimaan ekspor (Stabex), diversifikasi yang dibelanjai bersama oleh produsen dan konsumen dan pembatasan pengembangan dan penggunaan

bahan-bahan sintetis. Pada akhirnya negara-negara berkembang tampil dengan program komoditi terpadu dan harus menerima bahwa hanya sebagian kecil dari yang mereka tuntut dapat diterima oleh negara-negara industri maju. Sementara itu perdagangan komoditi primer tetap menunjukkan fluktuasi besar dalam harga maupun jumlah. Hanya dalam kasus kekecualian dapat digalang kebersamaan oleh negara-negara berkembang, sementara praktek umum adalah penyelamatan diri-sendiri sejauh mungkin. Apa yang disebut sebagai diversifikasi dalam Komunike Final Bandung dan Program Komoditi Terpadu UNCTAD masih tetap jauh dari berhasil, sementara kemajuan teknologi menjurus pada peningkatan penawaran komoditi primer di satu pihak dan penurunan permintaan bagi setiap satuan nilai tambah di lain pihak. Bahkan skema STABEX yang disediakan oleh Masyarakat Eropa untuk negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik pun ternyata tidak banyak menolong.

Bagaimanapun besarnya perhatian yang dicurahkan pada perdagangan komoditi-komoditi primer, negara-negara berkembang pada umumnya menyadari urgensi industrialisasi bagi pembangunan ekonomi. Perdagangan komoditi primer yang sangat stabil pun tidak dapat menjadi jawaban tunggal bagi semua pertanyaan sosio-ekonomi yang dihadapi suatu negara. Tetapi di lain pihak juga disadari bahwa masing-masing negara berkembang menghadapi keterbatasan dalam akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, keterampilan teknologis dan keterbatasan pasar. Karena itu keinginan untuk memacu pertumbuhan industri diikuti oleh berbagai tuntutan yang diajukan kepada negara-negara yang sudah maju. Di antaranya yang terpenting adalah penyediaan sumber-sumber finansial yang sedapat-dapatnya berbentuk transfer atau hibah, penyediaan bantuan teknis, transfer teknologi, kehadiran investasi asing langsung dan kemudahan-kemudahan untuk memasuki pasar negara-negara industri.

Untuk memahami perbedaan antara kedua belah pihak dalam bagian berikut digarisbesarkan usul-usul dalam TEIB serta posisi negara-negara industri yang menyangkut bidang-bidang tersebut di atas.

Sumber-sumber finansial yang dituntut oleh negara-negara berkembang adalah yang berbentuk bantuan resmi, mengandung elemen hibah yang setinggi mungkin, bebas dari ikatan dan sejauh mungkin disalurkan melalui badan-badan multilateral terutama Bank Dunia berikut bank-bank regionalnya. Fasilitas-fasilitas IMF pun diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan pembelanjaan pembangunan di negara-negara berkembang seperti tercermin dalam usul pengkaitan (linking) alokasi SDR (Special Drawing Right) dengan pembelanjaan pembangunan. Sebaliknya negara-negara industri sampai sekarang pun masih memandang investasi langsung dari

perusahaan swasta sebagai sumber finansial terbaik bagi negara berkembang. Bantuan resmi dipandang hanya sebagai pelengkap, itu pun lebih banyak disediakan secara bilateral daripada multilateral, sementara fasilitas-fasilitas IMF tetap dibatasi pada yang berjangka pendek.

Dalam alih teknologi negara-negara berkembang menghendaki kelonggaran, kalau bukan penghapusan pembatasan-pembatasan yang dikandung oleh ketentuan-ketentuan paten internasional, lisensi, rekayasa industri, dan merek perdagangan, sementara hubungan antara suatu perusahaan induk dengan anak perusahaan atau rekan lain di suatu negara berkembang diinginkan supaya tunduk pada Tata Cara Tingkah Laku (Code of Conduct). Sebaliknya negara-negara industri cenderung memperkuat perlindungan atas semua pemilikan intelektual (intellectual properties) yang disebut di atas dan menolak untuk mencampuri usaha-usaha multinasional di negara lain termasuk negara yang berkembang. Yang terakhir ini perlu digarisbawahi. Meskipun penelitian yang komprehensif belum ada, penelitian-penelitian di Amerika Latin mengungkap berbagai praktek perusahaan-perusahaan multinasional yang merugikan negara-negara berkembang. Perjanjian antara suatu perusahaan induk dengan anak perusahaan atau rekan usaha lain di negara-negara Amerika Latin antara lain mengandung pembatasan penelitian di negara tempat berusaha, pengalihan setiap penemuan di negara tempat berusaha untuk dipatenkan atau dirahasiakan sebagai penemuan perusahaan induk, kewajiban pembelian dari perusahaan induk, harga transfer sebagai upaya untuk memindahkan laba ke perusahaan induk, larangan atau pembatasan ekspor oleh anak perusahaan atau rekan usaha lain di negara tempat usaha. Dengan pembatasan-pembatasan seperti ini kiranya alih teknologi dapat terjadi hanya dalam skala yang sangat kecil.

Industrialisasi negara-negara berkembang pada umumnya memang mulai dengan substitusi impor di bawah proteksi tinggi. Tetapi dalam perjalanan waktu industri-industri ini pun membutuhkan pasar luar negeri sehingga pertanyaan pun timbul tentang akses ke pasar negara-negara maju. Sehubungan dengan itu negara-negara berkembang menuntut konsesi sepihak dari negara-negara industri berupa akses yang sejauh mungkin bebas dari halangan-halangan perdagangan, sementara negara-negara industri menuntut bahwa liberalisasi perdagangan harus tunduk pada asas ketimbalbalikan. Meskipun sejak tahun 1971 negara-negara industri menyediakan Sistem Preferensi Umum bagi negara-negara berkembang -- sebelumnya terdapat banyak sistem preferensi khusus -- akses ke pasar negara-negara industri pada dasarnya adalah tetap sulit, walaupun ada beberapa negara yang berhasil menarik manfaat dari Sistem Preferensi Umum tersebut. Bahkan belakangan ternyata bahwa proteksi di negara-negara industri justru dipusatkan pada barang-barang dagang yang sudah dapat diekspor oleh banyak negara berkembang

seperti tekstil dan pakaian atau hasil-hasil dari kulit. Sepanjang menyangkut pembatasan perdagangan dapat dikatakan bahwa baik negara-negara sedang berkembang maupun negara-negara industri bersikap tidak konsisten dengan dua titik tolak yang sulit dijumpai.

Peran penting dari pelayaran samudera dalam ekspor suatu negara sudah dikenali negara-negara Asia-Afrika bahkan sejak KAA sekalipun. Semakin tinggi ongkos pelayaran, semakin kecil peluang barang tertentu untuk dapat diekspor. Karena itu ke dalam TEIB juga termasuk Tata Cara Perilaku Konperensi Pelayaran. Tata cara ini didasarkan pada kesimpulan bahwa ongkos pelayaran internasional yang tinggi adalah akibat dari praktek-praktek konperensi sebagai kartel internasional; bahwa konperensi pelayaran internasional didominasi oleh perusahaan-perusahaan pelayaran dari negara-negara industri; bahwa konperensi pelayaran internasional mengenakan ongkos pelayaran yang diskriminatif atas ekspor negara-negara berkembang; dan bahwa konperensi pelayaran internasional pada umumnya adalah tertutup sehingga sangat menghambat pengembangan armada niaga samudera dari negara-negara sedang berkembang. Tidak semua kesimpulan ini dapat diuji secara empiris. Tetapi terlepas dari itu, negara-negara berkembang telah menuangkan usul-usul perubahan dalam tata cara yang disebut di atas. Eksistensi konperensi itu sendiri tidak dipertanyakan. Bahkan negara-negara berkembang adalah lebih restriktif dibanding negara-negara industri sepanjang menyangkut kapal-kapal samudera di luar konperensi. Yang dikehendaki oleh negara-negara berkembang adalah pengawasan konperensi oleh negara, pemberian ongkos pelayaran istimewa bagi ekspor negara berkembang (promotional rates), pembagian muatan internasional menurut rumus 40-40-20 (masing-masing 40% untuk armada negara pengekspor dan pengimpor sedang sisanya 20% untuk armada pihak ketiga) serta keterbukaan konperensi bagi keanggotaan baru. Anehnya, negara-negara industri pada dasarnya menerima usul-usul ini, meskipun bertentangan dengan asas liberalisasi dan asas non-diskriminasi yang disinggung di bagian depan tulisan ini. Latar belakangnya adalah kekhawatiran negara-negara ini untuk menghadapi armada komersial negara-negara Eropa Timur yang dalam dasawarsa terakhir menunjukkan kenaikan tonase yang pesat.

Di samping unsur-unsur yang telah dibahas di atas TEIB masih mengandung unsur-unsur lain, yaitu program khusus bagi negara-negara paling terbelakang, ketentuan-ketentuan untuk menjamin akses negara-negara daratan ke pelabuhan-pelabuhan internasional dan usul-usul yang menyangkut kelembagaan. Namun demikian bagian-bagian di atas menunjukkan betapa posisi dasar negara berkembang dan negara-negara industri berbeda jauh dan dalam banyak hal bahkan bertentangan satu terhadap yang lain. Posisi negara-negara Eropa Timur tidak diuraikan. Kelompok negara-negara

ini tidak menolak dukungan verbal terhadap usul-usul negara berkembang. Dengan mudah mereka mengutip apa yang dikemukakan negara berkembang tentang keterbelakangan ekonomik sebagai akibat kolonialisme dan karena itu menghindari tanggung jawab untuk memberikan kontribusi konkrit.

MENCARI PENJELASAN

Tigapuluh tahun sesudah KAA Bandung dan lebih 20 tahun sesudah UNCTAD I di Jenewa, tata ekonomi internasional yang berlaku dewasa ini lebih banyak adalah puing-puing Sistem Bretton Woods dan GATT daripada TEIB. Meskipun dirigisme dan diskriminasi cenderung meluas dalam ekonomi dunia dewasa ini, keduanya adalah lain dari yang dikehendaki oleh negara-negara berkembang. Dapat dikatakan bahwa usaha-usaha negara berkembang untuk mengubah tata ekonomi internasional sampai sekarang pada dasarnya adalah tidak efektif. Itu tidak berarti bahwa hasil sama sekali tidak ada. Yang dipertanyakan adalah perbandingan hasil tersebut dengan usaha yang dilakukan selama puluhan tahun dalam banyak forum internasional dan regional.

Di samping perbedaan-perbedaan dasar dalam sistem ekonomi, beberapa faktor kiranya patut ditonjolkan untuk menjelaskan kebuntuan yang dihadapi TEIB. *Pertama*, dialog ekonomik antara negara-negara berkembang dengan negara-negara industri sejak semula adalah, dan dari tahun ke tahun semakin konfrontatif. Negara berkembang, dengan menganggap bahwa sebagian dari unsur-unsur TEIB adalah bersifat reparasi kolonialisme, tampil dengan tuntutan-tuntutan maksimal, sementara negara-negara industri merasa cukup kalau sudah mengatakan: "Tidak." Yang dilakukan adalah bukan perundingan yang senantiasa adalah pencarian kompromi.

Kedua, pembagian dunia ke dalam negara-negara berkembang dan negara industri adalah tidak realistis. Masing-masing negara berkembang mewakili kepentingan yang berbeda karena perbedaan pertanyaan-pertanyaan sosio-ekonomik yang dihadapi. Tidak mengherankan kalau dukungan mereka terhadap usul-usul Kelompok 77 yang pada gilirannya tidak lain dari usul-usul Sekretariat UNCTAD, lebih banyak adalah simbolis daripada riil seperti terbukti dari keengganan mereka untuk meratifikasi beberapa persetujuan yang dicapai UNCTAD. Andaikan di antara negara-negara berkembang ada yang dominan dalam hubungan ekonomi sesama negara berkembang dan mempunyai sumber yang cukup untuk memikul beban-beban yang timbul karena keharusan untuk mendukung persetujuan tertentu, barangkali hasilnya akan lain. Tetapi negara seperti itu tidak ada. Sebaliknya negara-negara industri juga tidak dapat dimasukkan ke dalam satu keranjang. Jepang tidak pernah

membiarkan diri terbawa arus konfrontatif. Sikapnya terhadap usul-usul negara-negara berkembang adalah setengah ya dan setengah tidak. Perancis juga tidak dapat disamakan dengan Amerika Serikat atau Jerman Barat. Tetapi perbedaan-perbedaan ini yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mencapai kompromi, dibayangi oleh konfrontasi sebagai arus utama.

Ketiga, pengkaitan persoalan (issues) mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil perundingan. Di satu pihak memang persoalan perdagangan misalnya, berkaitan erat dengan persoalan moneter dan yang terakhir dengan persoalan-persoalan fiskal. Dengan kata lain, tidak satu pun persoalan adalah independen terhadap yang lain. Sebaliknya pencantuman semua persoalan dalam satu agenda akan membuat pengendalian perundingan menjadi sangat sulit, kalau tidak mustahil. Karena itu, persoalan-persoalan yang mendesak perlu didahulukan. Suatu perundingan global yang mencakup semua persoalan dan melibatkan semua negara tampaknya akan menghasilkan persetujuan-persetujuan yang lebih banyak bersifat semu daripada riil.

Keempat, konsistensi antara tata ekonomi internasional dengan tata ekonomi yang dianut masing-masing negara kiranya juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi jalannya perundingan. Adalah sulit untuk mengerti egalitarianisme yang sedikit banyak melatarbelakangi TEIB, jika dihadapkan dengan kesenjangan sosial yang buruk sebagai cermin elitisme feodal yang berlaku di banyak negara berkembang. Begitu juga adalah sulit memahami dirigisme TEIB jika dihadapkan dengan kecenderungan untuk bersandar pada mekanisme pasar di negara-negara yang lebih maju di antara negara-negara berkembang. Hal serupa juga berlaku bagi negara-negara industri yang dalam tahun-tahun terakhir cenderung menjadi dirigitis dalam perdagangan dengan negara-negara berkembang.

Penjelasan-penjelasan di atas tentu bisa ditambah. Tetapi mereka kiranya sudah cukup sebagai bahan pelajaran bagi usaha-usaha yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali diskusi tentang TEIB jika dilengkapi dengan analisa tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi dunia selama ini.

TANTANGAN BARU

Sesedikitnya sesudah UNCTAD VI Beograd debat tentang TEIB sudah jauh berkurang dalam frekuensi maupun iklim konfrontatifnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa perubahan atau penyesuaian dalam tata ekonomi internasional sudah tidak diperlukan. Bilateralisme tidak dapat menjadi jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan sosio-ekonomik yang timbul karena interdependensi ekonomik. Yang menjadi masalah kiranya adalah pembentukan konsensus yang tetap sulit, kalau tidak semakin sulit.

Dalam mempersiapkan usaha-usaha pembentukan konsensus tersebut, mereka yang berambisi untuk tampil dengan prakarsa perlu memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi dunia selama debat tentang TEIB berlangsung. Latar belakang yang berbeda antara tahun penyelenggaraan KAA Bandung dengan 30 tahun sesudahnya kiranya menuntut juga perubahan-perubahan dalam pendekatan.

Perubahan yang pertama menyangkut status politik negara-negara berkembang. Pada waktu paradigma tentang TEIB mulai lahir, bagian terbesar dari negara-negara berkembang yang sekarang masih berupa jajahan, protektorat atau sedang berusaha melepaskan diri dari peninggalan-peninggalan kolonial. Tidak heran kalau setiap kesukaran ekonomi, termasuk yang buatan sendiri pun, dapat dihubungkan dengan kolonialisme. Tetapi tatkala dekolonisasi sudah berlangsung puluhan tahun kiranya sudah tidak beralasan untuk mengatakan bahwa keterbelakangan masa kini adalah akibat kolonialisme. Karena itu pengkaitan TEIB dengan kewajiban pembayaran reparasi dari pihak negara-negara industri akan semakin tidak masuk akal, kalau tidak mustahil. Sesuai dengan itu, diperlukan pendekatan baru. Perundingan tentang perubahan tata ekonomi internasional tampaknya akan lebih subur kalau dilakukan sebagai transaksi sesama yang berdaulat dan tidak sebagai pengadilan atas dosa-dosa dalam masa yang sudah jauh lampau.

Perubahan kedua yang cukup penting adalah realisme yang semakin kuat tentang sistem ekonomi. Ketika debat tentang TEIB dimulai, setiap bangsa seolah-olah berkewajiban untuk memilih kapitalisme atau sosialisme, atau ekonomi pasar atau dirigisme. Sekarang kita menjadi saksi dari perubahan-perubahan sistemik yang cukup mendasar dan melepaskan diri dari dua ekstrem. Itu berarti bahwa perundingan-perundingan tentang perubahan atau penyesuaian tata ekonomi internasional sudah semakin bebas dari tempurung ideologis, seraya semakin terbuka bagi jalan tengah.

Kemajuan ekonomik yang sudah dicapai oleh banyak negara berkembang sesudah Konperensi Asia-Afrika Bandung merupakan perubahan ketiga yang perlu disadari. Sampai sekarang pun masih banyak yang merendahkan prestasi ekonomik yang dicapai oleh negara berkembang, seolah-olah sejak kemerdekaan politik kondisi ekonomik senantiasa memburuk. Uraian yang sangat pesimistik ini antara lain telah mengakibatkan radikalisisasi dalam perundingan-perundingan TEIB. Tidak dapat diingkari bahwa kemelaratan ekstrem masih menimpa banyak orang di negara berkembang tertentu menyusul kekacauan politik yang melumpuhkan pemerintahan. Tetapi itu tidak mengurangi arti tingkat pertumbuhan ekonomi negara berkembang secara keseluruhan yang sejak tahun 1950-an melebihi tingkat pertumbuhan negara industri sebagai kelompok. Bahwa kesenjangan pendapatan dengan negara-

negara industri tetap memburuk adalah konsekuensi dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus menaik di negara berkembang terutama di Afrika, sementara ia terus turun di negara-negara industri.

Kemajuan ekonomi negara berkembang itu sendiri membuatnya semakin menarik sebagai rekan dalam hubungan ekonomi negara-negara industri. Tetapi di lain pihak harus dicatat bahwa kemajuan masing-masing negara berkembang pun tidak seragam. Asia pada umumnya dan yang termasuk Pasifik Barat pada khususnya menunjukkan kemajuan yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan Afrika. Itu dapat berarti bahwa sikap bersama Asia-Afrika dalam persoalan ekonomi internasional semakin sulit dibentuk. Semakin kuat suatu negara tergantung pada perdagangan, semakin sulit baginya untuk memberikan dukungan konkret pada usul-usul yang berbau dirigisme. Karena itu, dialog Selatan-Selatan pun semakin membutuhkan reorientasi.

Perubahan lain yang juga perlu dicatat adalah kecenderungan konsentrasi investasi asing langsung di negara-negara industri sendiri. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Jepang dalam penetrasi pasar Eropa dan Amerika Serikat telah mendorongnya untuk menanam modal secara langsung di kedua pasar ini. Mungkin saja bahwa investasi langsung ini pun akan dihilangi. Tetapi itu akan lebih sulit dibanding penghalangan perdagangan. Di samping itu, Republik Rakyat Cina telah tampil dengan ketentuan-ketentuan yang liberal tentang investasi asing. Memang masih terbatas pada Kawasan Ekonomi Khusus dan 14 kota terbuka. Tetapi dengan keterbatasan ini pun RRC mungkin akan berhasil menyerap bagian yang besar dari investasi asing langsung sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan sejak tahun 1981.

Reorientasi investasi asing menjauhi negara-negara berkembang membuat bagian besar dari usul-usul TEIB yang menyangkut investasi asing dan perusahaan multinasional menjadi kurang relevan. Bukan penanam modal lagi yang bersaing mendapat lokasi di negara berkembang, melainkan sebaliknya. Dalam kondisi yang demikian masing-masing negara berkembang tampaknya akan melakukan "liberalisasi" dalam ketentuan-ketentuan mengenai investasi asing, berlawanan dengan kecenderungan yang restriktif dari TEIB.

Perubahan selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pencarian konsensus baru tentang tata ekonomi internasional menyangkut kemajuan teknologi. Apabila dalam tahun 1960-an dan 1970-an beberapa negara berkembang berhasil membangun keunggulan komparatif dalam beberapa industri, kesinambungan keunggulan ini kini dihadapkan dengan tantangan baru yang bersumber dari kemajuan teknologi di negara-negara industri. Di sektor manufaktur, beberapa industri sedang berada pada ambang pintu otomatisasi

(penuh) di negara industri. Buruh negara berkembang harus bersaing dengan robot negara industri. Hasil-hasil tambang alamiah pun mendapat persaingan yang semakin tajam dari hasil-hasil sintetis sehingga pasar akan ditandai oleh kelebihan penawaran. Dalam budidaya pangan, kemajuan teknologi bio diperkirakan akan memperbaiki keunggulan komparatif negara-negara industri dibanding negara berkembang. Kiranya adalah suatu ilusi mengharapkan bahwa negara-negara industri akan menghalangi perkembangan-perkembangan teknologis ini karena mempertimbangkan kepentingan negara berkembang. Yang dapat diandalkan untuk menghadapinya adalah kemajuan teknologi di masing-masing negara berkembang.

PENUTUP

Perubahan-perubahan yang disebut di atas sama sekali tidak berarti bahwa relevansi tata ekonomi internasional baru sudah hilang. Yang diperlukan adalah reorientasi dalam gagasan-gagasan yang seharusnya dikandung oleh tata ekonomi baru tersebut. Bahkan seandainya pun semua negara berkembang mengikuti gagasan pemisahan diri (delinking) dari ekonomi dunia kapitalis, tata ekonomi internasional baru tetap masih akan relevan.

Reorientasi diperlukan dalam pandangan tentang hakikat hubungan ekonomi luar negeri, hakikat solidaritas sesama negara-negara berkembang, pengkaitan persoalan-persoalan (issue linkaging), pembobotan masing-masing persoalan dan pendekatan dalam perundingan-perundingan. Reorientasi inilah yang diharapkan dapat didorong oleh peringatan 30 tahun Konperensi Asia-Afrika yang baru lalu dan pertemuan Selatan-Selatan yang tentu akan menyusul. Untuk itu diperlukan konsepsi yang barangkali dapat diprakarsai oleh Indonesia bersama negara berkembang lain.